

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1950-an, di Indonesia umumnya digambarkan sebagai tahun-tahun usaha yang gagal untuk menegakkan demokrasi parlementer dan sebagai tahun-tahun tegarnya dan gelisahnya daerah menghadapi usaha mempersatukan Indonesia.<sup>1</sup> Begitu pun yang di alami oleh daerah Bekasi yang ingin memisahkan diri dari wilayah Jakarta tahun 1950, berbagai upaya dilakukan untuk memiliki daerah yang tak ingin dijajah. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949, Negara Pasundan merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Sedangkan Distrik Jakarta yang di dalamnya terdapat Bekasi, merupakan wilayah yang masuk dalam Negara Pasundan.

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan Indonesia belum memiliki rancangan yang tegas menyangkut norma atau aturan operasional yang akan dipakai dalam pembentukan pemerintahan daerah. Pembentukan daerah-daerah di Jawa hanya mengikuti keadaan yang berlangsung pada masa Hindia-Belanda, yaitu *Propincie*, *Regentschap*, dan *Stadsgemeente*.<sup>2</sup> Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, pemerintah Indonesia mulai membuat aturan operasional mengenai pembentukan pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Berdasarkan isi undang-undang tersebut, menyangkut pemerintah daerah disusun atas lima tingkatan, yaitu Propinsi, Kabupaten (Kota Besar), Kewedanaan, Kecamatan, dan desa (kota kecil, nagari, marga dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Bab I, Pasal I, Ayat 1 UU No. 22 Tahun 1948).

---

<sup>1</sup>Sita Van Bemmelen & Remco Raben, *Antara Daerah Dan Negara; Indonesia Tahun 19501-an*, (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 296.

<sup>2</sup>The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah; di Negara Republik Indonesia, Jilid I*. (Yogyakarta: Liberty), hlm. 113.

<sup>3</sup>Andi Sopandi, *Sejarah Dan Budaya Kota Bekasi; Sebuah Catatan perkembangan Sejarah dan Budaya Masyarakat Bekasi*, (Bekasi: Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan , dan Kepariwisata Kota Bekasi, 2009), hlm. 87.

Upaya pembentukan Kabupaten Bekasi dimulai ketika rakyat Bekasi berupaya menentang keberadaan Negara Indonesia Serikat (RIS). Rakyat Bekasi menuntut berdirinya kembali negara kesatuan RI dan menentang keberadaan Pasundan.<sup>4</sup> Dalam upaya ini para pemimpin rakyat salah satunya K.H Noer Alie berperan dalam perubahan nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi, dan ada beberapa tokoh lainnya yang berperan diantaranya R. Supardi, M. Hasibuan, Namin, Aminudin, dan Marzuki Urmainsi, membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi” pada awal tahun 1950. Pembentukan ini mulai terjadi pada Tanggal 17 Januari 1950, dimana para Panitia Amanat Rakyat Bekasi mengadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh ribuan rakyat.

Setelah adanya pengajuan untuk pembentukan Kabupaten Bekasi yang semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten di lingkungan propinsi Jawa Barat serta dengan memperhatikan perarturan pemerintah No.32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang tersebut, maka Kabupaten Bekasi dibentuk secara resmi realisasi perantiannya tanggal 15 Agustus 1950 dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1948.<sup>5</sup> Pengertian dan realisasi pembangunan pada masa RIS dapat dikatakan tidak berjalan. Hal ini diakibatkan disamping karena tidak adanya dana untuk membangun, juga situasi keamanan yang tidak menentu.<sup>6</sup>

Sejak adanya pemilihan umum tahun 1955 yang diharapkan mempersatukan seluruh potensi politik masyarakat, ternyata dinilai oleh Presiden Sukarno sebagai pertentangan antara kepentingan politik rakyat.<sup>7</sup> Karena pada masa ini banyak konsepsi yang harus dibentuk pada tanggal 21 Februari 1957. Seperti konsepsi Sukarno yang menyarankan agar dibentuk Kabinet Gotong Royong dan

---

<sup>4</sup>Andi Sopandi, *Sejarah Dan Budaya Kota Bekasi; Sebuah Catatan perkembangan Sejarah dan Budaya Masyarakat Bekasi*..... hlm. 89.

<sup>5</sup>Andi Sopandi, *Sejarah Dan Budaya Kota Bekasi; Sebuah Catatan perkembangan Sejarah dan Budaya Masyarakat Bekasi*..... hlm. 93.

<sup>6</sup>Pemerintah Daerah Bekasi Tingkat II Bekasi, *Sejarah Bekasi Sejak pemerintahan purnawarman sampai orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Historia Vitae Magistra (Yavitra), 1992), hlm. 85.

<sup>7</sup>Sukarno, “Marilah Kita Kubur Partai-Partai (1956)”, dalam Herbert Feith & Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 62-66.

Dewan Nasional. Disusul dengan beberapa kebijaksanaan, undang-undang, peraturan pemerintahan, serta penetapan presiden dan peraturan lain yang merombak sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.

Perkembangan Bekasi mulai terlihat di masa orde baru setelah tahun 1965-an mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi terutama ketika masa pemerintahan Bupati H. Abdul Fatah<sup>8</sup>. Proses pembangunan dan berbagai proyek sarana dan prasarana fisik terasa menonjol, seperti pembangunan irigasi pengairan fisik. Perubahan lainnya terjadi pada tahun 1976, ketika wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi mengalami pemekaran beberapa wilayah Kecamatan dan Desa.<sup>9</sup>

Berdasarkan intruksi Presiden No.13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan wilayah JABOTABEK untuk meringankan tekanan penduduk Jakarta yakni dengan cara membina pola pemukiman perkotaan dan penyebaran kesempatan kerja. Salah satu dari wilayah pengembangan kota tersebut adalah Kabupaten Bekasi, mengingat wilayah ini memiliki potensi untuk berkembang.<sup>10</sup> Perluasan wilayah kota Jakarta merupakan sebuah alternatif untuk mengantisipasi pertumbuhan kota Jakarta yang ketika itu makin pesat, kemudian teretusnya gagasan bernama JABOTABEK melalui intruksi Presiden 13 tahun 1976. Pokok-pokok kebijaksanaan di dalam pengembangan wilayah Jabotabek diantaranya adalah untuk menekan jumlah penduduk yang terus bertambah serta dapat meratakan penyebarannya yang tidak hanya terjadi di kota Jakarta melainkan kota-kota penyangga disekitarnya. Dengan begitu banyak beban kota Jakarta sebagai sebuah kota induk dari segi pembangunan ekonomi maka Bekasi dijadikan kota yang terkait dengan terbentuknya JABOTABEK.

---

<sup>8</sup>Rintisan program yang dirancangnya, kini terbukti dengan semakin merebaknya pembangunan yang terjadi di Bekasi. Oleh karena itu, bagi kebanyakan kalangan, ia dikenal sebagai **“Bapak pembangunan Bekasi”**. Dalam buku Andi Sopandi, *Sejarah Dan Budaya Kota Bekasi; Sebuah Catatan perkembangan Sejarah dan Budaya Masyarakat Bekasi*, (Bekasi: Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisata Kota Bekasi, 2009), hlm 129.

<sup>9</sup>Pemerintah Daerah Bekasi Tingkat II Bekasi, *Sejarah Bekasi Sejak pemerintahan purnawarman sampai orde Baru,..... Op. cit*, hlm. 130.

<sup>10</sup>Yufriawati, *Pembinaan Kota : Studi Kasus Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Bekasi*. Diambil dari: <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-76536.pdf>

Pengembangan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta sudah direncanakan jauh sebelumnya, diantaranya dengan penataan kawasan Bekasi yang diperuntukkan untuk pemukiman dan dijadikan wilayah industri. Cikarang, Cibitung dan Lemahabang yang sebelumnya dikenal daerah pertanian dan perkebunan mulai dikembangkan menjadi daerah pengembangan industri. Pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut semakin marak ketika tahun 1982 mulai dibangunnya jalan tol Cawang-Cikampek.<sup>11</sup> Akibat dari perkembangan yang cukup pesat sejak tahun 80-an, maka secara tidak langsung berdampak terhadap perkembangan wilayah administratif dan pola pembangunan daerah Bekasi meliputi faktor-faktor infrastruktur dan perubahan sosial masyarakat Bekasi. Bekasi yang merupakan wilayah sub-urban, dan merupakan kota satelit penopang sebuah kota besar yaitu Jakarta. Bekasi berkembang bukan hanya menjadi tempat tinggal kaum urban namun juga berkembang menjadi sebuah kota industri barang dan jasa. Daerah yang dahulunya menjadi merupakan wilayah agraris kemudian bertransformasi menjadi yang didominasi oleh kegiatan perindustrian. Arus modernisasi terus merambat terlihat dari banyaknya pusat perbelanjaan dan pusat-pusat industri membuat kota Bekasi terus bertransformasi menjadi sebuah kota yang modern.

Faktor penyebab umum yang mendorong sebuah tempat atau daerah berkembang menjadi kota yaitu pertama, pusat kegiatan agama. Johnson berpendapat, agama merupakan kekuasaan penting yang menyebabkan penyatuan desa-desa dalam kesatuan-kesatuan yang lebih besar. Kedua, daerah pusat pemerintahan dimana kondisi daerah lebih berkembang pesat di Indonesia masa orde baru. Ketiga, daerah pusat perdagangan dan industri seperti di Eropa sesudah revolusi Industri atau secara umum pada abad ke-19 adalah pusat-pusat perdagangan berubah menjadi pusat industri begitu juga yang terjadi di Bekasi setelah perubahan pembentukan kewedanaan Bekasi menjadi Kabupaten sudah mulai ada perubahan dalam tatanan daerah. Keempat, kasus-kasus negara

---

<sup>11</sup>Pemerintah Daerah Bekasi Tingkat II Bekasi, *Sejarah Bekasi Sejak pemerintahan purnawarman sampai orde Baru..... Op. cit*, hlm. 130.

jajahan.<sup>12</sup> Peradaban kota menjadi gejala dalam bentuk-bentuk kebudayaan tertentu, seperti tempat-tempat yang dahulunya lahan sawah dan perkebunan kini menjadi tempat yang dibangun sebuah gedung-gedung tinggi, sehingga terciptalah tatanan baru dalam perkembangan kota. Berkembangnya industrilisasi melalui lapangan kerja di Bekasi merupakan awal terjadinya perkembangan penduduk yang sangat tinggi dan mempengaruhi tatanan suatu daerah khususnya Bekasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dan bermaksud menelitinya dengan adanya perubahan tersebut dengan menuangkannya dalam karya tulisan ilmiah dengan judul **“Sejarah Perkembangan Kota Bekasi Tahun 1950-2000”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bekasi sebagai kabupaten tahun 1950?
2. Bagaimana perkembangan infrastruktur dan sosial masyarakat Bekasi secara umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian ini, bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Bekasi sebagai Kabupaten tahun 1950.
2. Untuk mengetahui perkembangan infrastruktur dan sosial masyarakat Bekasi.

### **D. Kajian Pustaka**

Ada karya ilmiah yang membahas wilayah Bekasi dengan judul *Bekasi pada masa Revolusi tahun 1945-1949*, yang ditulis oleh Ismawati yang mendeskripsikan sebagian wilayah Bekasi dan sejarah revolusi yang terjadi di

---

<sup>12</sup>Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 18-19.

Bekasi. Dan ada Skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Siti Nurkholilah yang berjudul *Penolakan Masyarakat Bekasi Terhadap Adanya Patung Lele Di Bekasi Tahun 1995-2002*, karya ilmiah ini tidak fokus pada judul peneliti. Beberapa karya yang memuat mengenai Bekasi secara umum adalah buku yang berjudul *Sejarah dan Budaya Kota Bekasi: Sebuah Catatan perkembangan Sejarah dan Budaya Masyarakat Bekasi* Karya Andi Sopandi, di dalamnya memuat asal-usul Bekasi dari jaman kerajaan sampai saat ini. Selain sejarah juga berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Bekasi. Secara keseluruhan tidak fokus pada judul peneliti. Karya lain yaitu buku *Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru* yang diterbitkan oleh pemda Bekasi secara keseluruhan hanya dipaparkan secara kronologis dari zaman kerajaan sampai orde baru.

Adapun rencana kajian pada penelitian ini penulis adalah terfokus pada perubahan Bekasi dari Wedana Bekasi sampai menjadi sebuah kota yang berkembang dari segi ekonomi dan sosial masyarakat Bekasi, objek kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kota Bekasi tahun 1950-2000. Oleh karenanya, penelitian ini layak dikaji lanjut agar bisa mengetahui perkembangan kota Bekasi tahun 1950-2000.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Heuristik dan Kritik Sumber**

Tahapan heuristik (pengumpulan sumber) dilakukan setelah peneliti menentukan topik yang akan dikaji peneliti dalam penyusunan proposal. Peneliti memilih topik bahasan berkaitan dengan Sejarah perkembangan Kota Bekasi Tahun 1950-2000, yang merupakan kota yang berkembang pesat di Indonesia. Setelah penentuan topik, tahapan selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah dan perkembangan sebuah kota yang relevan dengan masalah atau judul yang akan diteliti. Sumber-sumber yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini banyak ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jalan Salemba dan di Jalan Merdeka Selatan, Arsip

Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya, dan perpustakaan di Bekasi dan Bandung.

Pada tahap kritik, peneliti menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak cukup dengan merangkaikan fakta-fakta saja tetapi diperlukan sebuah kerangka pemikiran teoritis. Tahapan ini diikuti dengan mengadakan kritik sumber-sumber yang dikumpulkan dan dilakukan kritik ekstern dan intern.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern untuk mengetahui keotentikan suatu sumber termasuk menyelidiki bentuk sumber. Kritik eksternal dilakukan sesuai dengan zaman. Terkait dengan sumber-sumber yang didapat, peneliti melakukan kritik eksternal dengan melihat tulisan-tulisan dari aspek pengarang, penerbit dan tahun terbit yang terkait dengan peristiwa tersebut, seperti dalam koran yang penulis foto copy langsung dari perpustakaan Nasional.

Dalam surat kabar *Pemandangan* yang digunakan merupakan surat kabar asli yang di Fotocopy langsung dari ruang surat kabar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. surat kabar ini ada yang masih dalam keadaan baik, sehingga mudah dibaca dan ada yang rusak sehingga sulit dibaca, dan peneliti hanya bisa menulis. Sedangkan Arsip yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan bisa di fotocopy dan Arsip dari Dinas Arsip Kabupaten dan Kota.

Untuk kritik eksternal sumber lisan peneliti sedikit sulit untuk mendapatkan sumber karena sumber tulisan yang terkait dengan sejarah Bekasi berada ditempat yang jauh dan sumber lisan merupakan pelaku sejarah yang memiliki peran penting pada penelitian.

b. Kritik Intern

Dalam kritik intern peneliti melakukan telah terhadap surat kabar atau arsip yang dijadikan acuan dalam penelitian, surat kabar *Pemandangan* yang berisi tentang Rakyat Menuntut Bubarnya Distrik Federal sekitar tahun 1950. Sedangkan arsip-arsip yang didapat berisi tentang Undang-undang dan surat

Keputusan Wedana Distrik Federaal Bekasi yang ditanda tangani oleh kepala Wedana Distrik Bekasi pada tanggal 6 Februari 1950 dan arsip tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dan Kota Bekasi. Dan beberapa buku dan majalah yang bersangkutan dengan judul penelitian tentang sejarah dan perkembangan kota Bekasi Tahun 1950-2000.

Untuk menemukan sumber lisan (wawancara) peneliti agak sulit untuk menemukannya karena saksi-saksi sudah pada meninggal.

Ada beberapa sumber yang berkaitan dengan judul peneliti:

a. Sumber primer

Adapun sumber primer yang jadi acuan yaitu:

1. Arsip Surat Keputusan Wedana Distrik Federal Bekasi Tanggal 6 Februari 1950.
2. Arsip Undang-Undang Pembentukan Provinsi Djawa Barat Tahun 1950.
3. Arsip Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi.
4. Arsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Membentuk Daerah-daerah Kabupaten.
5. Arsip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
6. Surat Kabar Pemandangan "*Rakyat Menuntut Bubarnya Distrik Federal*" Tanggal 1 Februari Tahun 1950.
7. Surat Kabar Pemandangan "*Pemerintah Militer Di Daerah Republik Supaya Dihapuskan*" Tanggal 8 Februari 1950.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder lainnya:

1) Buku

1. A Van Bemmelen, Remco Raben. *Antara Daerah dan Negara; Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2011.



2. Ali Anwar. *Kemandirian Ulama Pejuang KH Noer Alie*, Bekasi: Yayasan Attaqwa, 2015.
3. Andi Sopandi. *Sejarah dan Budaya Kota Bekasi; Sebuah Catatan perkembangan Sejarah dan Budaya Masyarakat Bekasi*, Bekasi: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisata Pemerintah Kota Bekasi, 2009.
4. Andi Sopandi, dkk. *Sejarah Bekasi Dari Masa Kerajaan Hingga Masa Pembangunan*. Bekasi: Kantor Arpuslahta Kabupaten Bekasi.
5. Dien Majid, Darmiati. *Jakarta-Karawang-Bekasi Dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moe'min*. Jakarta: Keluarga Moeffreni Moe'min, 1999.
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi. *Citra Kota Bekasi dalam Arsip*. Bekasi: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi, 2016.
7. Endra Kusnawan. *Sejarah Bekasi Sejak peradaban Buni Ampe Wayah Gini*. Bogor: Herya Media, 2016.
8. Freek Colombijn, dkk. *Kota Lama Kota Baru (Sejarah Kota-Kota di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
9. Frans Husken, dkk. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di Bawah Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
10. Ganda Maneswara. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950 (Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan)*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010.
11. N Daldjoelani, A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
12. Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi. *Sejarah Bekasi Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Historia Vitae Magistra (Yavitra), 1992.

13. Pemerintah Kabupaten Bekasi. *Kabupaten Bekasi dari Masa ke Masa*. Bekasi: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi, 2006.
14. Pemerintah Kota Bekasi. *Selayang Pandang Kota Bekasi 2016*. Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, 2016.
15. Purnawan Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
16. Robert Bridson Cribb. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pergolakan Antara Otonomi Dan Hegemoni*. Jakarta: Pustaka Utama Grafi, 1990.
17. Robinson Tarigan. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
18. Sri Margana, M. Nursan. *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, dan permasalahan Sosial*. Yogyakarta: penerbit Ombak, 2010.
19. Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

## 2) Jurnal

1. Andi Sopandi. *Bekasi di masa revolusi 1945-1949*, Jurnal Seminar sejarah yang di selenggarakan oleh KAMASA Bandung-Front Bekasi-Historika Indonesia. Ujung Harapan, Bekasi, 2017.
2. Abdul Maqin. "Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat". *Trikonomika*, Volume 10 No. 1, Juni 2011.

## 3) Internet

1. Ali Anwar. "Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi" dalam <https://alianwar.wordpress.com/2008/09/01/sejarah-singkat-kabupaten-bekasi/>. Diakses pada tanggal 1 September 2008.
2. Endra Kusnawan. "Resolusi Rakyat Bekasi (17 Januari 1950)" dalam <http://wisatasejarahbekasi.blogspot.co.id/2017/01/resolusi->

- rakyat-bekasi-17-januari-1950.html. Diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 15.33 WIB.
3. <http://anterobekasi.com/2017/04/02/resolusi-17-januari-bekasi/>. Diakses pada tanggal 2 April 2017.
  4. <https://pengembanganperkotaan.wordpress.com/2011/11/09/teori-teori-perkembangan-kota/> . Di akses pada tanggal 9 November 2011.
  5. [http://Resipstory\\_S1-2014-2853-chapter.pdf.html](http://Resipstory_S1-2014-2853-chapter.pdf.html). Diakses pada tahun 2014.

Selain mengunjungi beberapa perpustakaan, toko buku, mencari tempat-tempat yang terkait, penulis juga mencari beberapa pendapat dari para seseorang yang mengetahui penelitian tersebut, dan peneliti juga melakukan *browsing* internet untuk mendapatkan artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan dalam format pdf yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan Kota Bekasi. Penelusuran melalui internet (*browsing*) dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi agar dapat mengisi kekurangan-kekurangan dari sumber yang sudah didapatkan.

## **2. Interpretasi**

Dalam tahapan interpretasi atau penafsiran, peneliti mencoba melakukan tafsiran/interpretasi seobjektif mungkin dengan selalu mencantumkan sumber yang peneliti gunakan. Dalam tahapan interpretasi ini, peneliti melakukan dua hal, yaitu dengan analisis dan sintesis.<sup>13</sup> Pada tahapan analisis dengan menguraikan bahasan yang akan dikaji peneliti karena terkadang sumber mengandung beberapa kemungkinan. Peneliti mencoba menguraikan kondisi Bekasi sebelum ada perubahan, latar belakang dan perkembangan kota Bekasi Tahun 1950-2000. Sehingga dapat disimpulkan, dibandingkan, dan dikaitkan dengan kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan perkembangan Kota Bekasi. Kemudian tahap sintesis, sumber informasi yang diuji dalam tahapan kritik sehingga menghasilkan apa yang disebut fakta, dari uraian-uraian informasi peneliti mencoba menyatukan

---

<sup>13</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng pustaka, 2005), hlm. 102.

dan mengambil kesimpulan Tentang Sejarah dan Perkembangan Kota Bekasi Tahun 1950-2000. Fakta tersebut kemudian disusun menurut urutan-urutan kausal yang logis dan harmonis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, inilah proses tahap sintesis.

Setelah diperoleh dengan adanya analisis dan sintesis yang dilakukan peneliti untuk menjawab atau menerangkan masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut. Dalam tulisan ini juga digunakan melalui teori sebagai ilmu bantu sejarah. Pertama, Teori geopolitik yaitu ilmu yang menyangkut masalah geografi wilayah dan politik pada suatu pemerintahan, *Rudolf Kjellen* mengembangkan teori ruang *Ratzel* dengan menganggap bahwa negara dirumuskan melalui sistem politik, pernyataan ini sesuai dengan judul yang peneliti lakukan dengan mencoba melakukan teori ini karena wilayah Bekasi wilayah yang signifikan dalam perkembangannya. Kedua, menggunakan teori metropolitan, Teori ini dikemukakan oleh *E.W. Burgess*, atas dasar studi kasusnya mengenai morfologi kota Chicago, menurutnya sesuatu kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Oleh karena semua bagian-bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola keruangan yang dihasilkan akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis, dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya.<sup>14</sup> Ketiga, ada beberapa macam teori sosial, teori dalam ilmu sosial adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Fenomena tersebut dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah.<sup>15</sup> Peneliti mencoba menggunakan teori modernisasi diramu oleh kalangan ilmuwan sosial pada pertengahan abad 20 untuk melihat bagaimana negara-negara barat terutama Amerika Utara dan Eropa Barat bisa berkembang sedemikian rupa. Negara-negara barat yang diteliti dianggap berhasil menjadi modern setelah melalui tahapan-tahapan yang bisa diidentifikasi, meskipun perkembangannya kini semakin kompleks. **Berkembang**

---

<sup>14</sup> <https://pengembanganperkotaan.wordpress.com/2011/11/09/teori-teori-perkembangan-kota/> (di akses pada tanggal 9 November 2011)

<sup>15</sup> <https://www.padamu.net/teori-dalam-ilmu-sosial> (Di akses pada tanggal 13 April 2017)

**di sini diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi.**

Teori modernisasi melihat serangkaian proses yang terjadi sebagai prasyarat untuk bergerak dari kondisi yang tradisional menuju modern. **Proses tersebut meliputi industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokrasi, konsumsi, dan demokrasi.**<sup>16</sup> Secara praktis, proses tersebut dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur di hampir segala bidang, sistem transportasi dan komunikasi yang mendorong masyarakat untuk semakin mobile, dan dibangunnya institusi sosial seperti sekolah formal dan media massa yang merupakan komponen penting penguat sistem demokrasi. Dalam aspek demografi, angka populasi secara di beberapa negara menurun atau meningkat namun tidak signifikan. Termasuk perubahan politik ke arah demokrasi dan demokratisasi. Dalam sejarah dilihat dari segi tempat, apalagi suatu daerah menjadi tepat pembentukan peradaban yang lebih tinggi, dan Bekasi memenuhi kriteria peradaban yang semakin pesat dengan perkembangan yang ada dari infrastruktur sebuah kota yang administratif.

Maka dari itu berdirinya wilayah Bekasi perkembangannya tidak lepas dari kawasan kota yang administratif letaknya pun berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta sehingga mengalami tekanan perkembangan penduduk yang semakin pesat. Sehingga Kedua teori yang dikemukakan penulis diharapkan dapat memberikan konsep proses berdiri dan berkembangnya sejarah perkembangan Kota Bekasi tahun 1950-2000.

### **3. Historiografi (Penulisan Sejarah)**

Setelah melakukan proses analisis terhadap fakta-fakta yang ada, peneliti kemudian menyajikannya historiografi merupakan proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan. Peneliti berusaha penyampaian hasil rekonstruksi imajinatif yang sesuai dengan data yang didapat oleh penulis, dalam tahapan penulisan ini menggunakan teknik dasar menulis deskripsi, narasi dan analisis.

---

<sup>16</sup> <http://sosiologis.com/teori-modernisasi> (Di Akses Tanggal 28 Januari 2018)

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian. Historiografi atau laporan hasil penelitian merupakan puncak dari suatu prosedur penelitian sejarah. Setelah melakukan langkah heuristik, kritik dan interpretasi seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh, disusun menjadi suatu karya tulis ilmiah berupa dalam historiografi. Proposal ini disusun dengan sistematika yang telah baku dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Sistematika penulisan yang digunakan sesuai dengan sistematika penulisan proposal yang termuat dalam buku Panduan penyusunan dan penulisan skripsi Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Secara garis besar, dalam laporan akhir terdiri dari tiga BAB yaitu BAB I, BAB II, dan BAB III. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan dan sistematisasi dalam memahami penulisan.

Bagian BAB I, dalam bab ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup dari : A. Latar Belakang, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Masalah, D. Kajian Pustaka, dan E. Langkah-Langkah Penelitian.

Bagian BAB II, dalam bab ini menjelaskan Sejarah Berdirinya Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari: A. Letak Geografis, B. Kondisi Sosial Masyarakat Bekasi, C. Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi Tahun 1950 hingga Kota Bekasi.

Bagian BAB III, dalam bab ini menjelaskan perkembangan Kota Bekasi Tahun 1950-2000, yang terdiri dari: A. Perkembangan Pemerintahan Bekasi: 1) Masa Demokrasi Liberal 2) Masa Demokrasi Terpimpin 3) Masa Kota Administratif B. Perkembangan Infrastruktur Kota Bekasi Secara Umum, C. Pengaruh Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Masyarakat Bekasi

Bagian BAB IV, yaitu kesimpulan yang merupakan tahapan terakhir berupa kesimpulan dan saran yang menyimpulkan bahasan yang diambil dari pokok-pokok uraian pembahasan dari Bab II dan III.

Bagian akhir terdiri dari lampiran-lampiran. Bagian lampiran terdiri dari lampiran yang mendukung Rencana Penelitian berupa lembar-lembar keterangan

yang dipandang perlu untuk disertakan dalam laporan akhir yang mendukung Rencana Penelitian, seperti surat pengantar penelitian, data-data dari lapangan (*copy* dokumen, foto, peta, transkrip wawancara dan lain-lain).

